Jejak 6 (2) (2013): 103-213. DOI: 10.15294/jejak.v7i1.3596

JEJAK
Journal of Economics and Policy
http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak

KETAHANAN PANGAN DAN POLA DISTRIBUSI BERAS DI PROPINSI JAWA TIMUR

Yunan Syaifullah✉

Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596

Received : 2013; Accepted: 2013; Published: September 2013

Abstract

The problem of food security is availability, distribution and consumption. The problem of availability is limited and decreasing production capacity: the distribution's problem are insfrastructure, institution, safety link of distribution's and the variation production capacity between region dan season. The problem of consumption is most of energy consumption are grain and rice biased. The policy of food security not only to create the food sufficiency with development economic with rural and agriculture are the basis, but also the sufficiency of food for poor society. In order to create food reserve of society, lumbung desa is important to be improved.

Keywords: food security, rural, agriculture, food reserve, distribution rice

Abstrak

Masalah ketahanan pangan meliputi ketersediaan bahan pangan, distribusi dan konsumsi. Masalah ketersediaan bahan pangan dapat menurunkan kapasitas produksi : masalah distribusi ini meliputi infrastruktur, institusi, jaringan distribusi dan kapasitas produksi antara wilayah dan musim. Masalah konsumsi yang paling krusial adalah konsumsi untuk gandum dan beras. Kebijakan ketahanan pangan tidak hanya untuk menciptakan kecukupan pangan dalam hal pembangunan ekonomi, tetapi juga kecukupan pangan bagi masyarakat miskin. Dalam rangka menciptakan cadangan pangan masyarakat, Lumbung Desa penting untuk ditingkatkan.

Kata Kunci: ketahanan pangan, pedesaan, pertanian, cadangan makanan, beras distribusi

How to Cite: Syaifullah, Yunan. (2013). Ketahanan Pangan dan Pola Distribusi Beras di Propinsi Jawa Timur. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6 (2): 103-213 doi: 10.15294jejak.v7i1.3596

© 2013 Semarang State University. All rights reserved

✉ Corresponding author :
E-mail: yunanssaifull@gmail.com

ISSN 1979-715X

PENDAHULUAN

Pengembangan perdesaan dewasa ini menjadi bahasan yang penting dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan suatu Negara. Argumentasi hal ini bermuara dari realitas objektif bahwa sebagian besar penduduk di negara berkembang bermukim di daerah perdesaan dan mayoritas bekerja di sektor pertanian. Sedangkan, diluar alasan itu, wilayah perdesaan karena lokasinya yang jauh dari perkotaan dan pem-bangunan senantiasa dicirikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi. Setidaknya karena adanya fakta sedikit kesempatan kerja di luar sektor pertanian (*non-farm*) dan jauh dari pasar. (Yustika, 2007:2)

Dengan kondisi yang demikian, tidaklah mungkin menyelenggarakan pembangunan di negara berkembang tanpa melibatkan wilayah perdesaan. Bahkan, pembangunan di negara berkembang harus melihat wilayah perdesaan dan sektor pertanian sebagai fokus dan target pembangunan. Karena itu, keberhasilan pembangunan di negara berkembang bisa dilihat dari perkembangan di wilayah perdesaan sendiri. Bila mayoritas penduduk di perdesaan bisa melakukan mobilitas sosial-ekonomi pembangunan, maka bisa disimpulkan pembangunan di negara berkembang telah menjangkau sebagian besar warga negaranya, demikian sebaliknya.

Wilayah perdesaan di dunia ketiga biasanya dideskripsikan sebagai tempat bagi orang-orang untuk bekerja di sektor pertanian. Sementara itu dalam pengertian yang sempit, desa adalah suatu masyarakat para petani yang mencukupi hidup sendiri (swasembada) (Boeke, 1983:16)

Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian di suatu negara harus tercerminkan oleh kemampuan negara tersebut dalam melakukan swasembada pangan. Setidaknya, upaya untuk menciptakan ketahanan pangan. Di Indonesia, ketahanan pangan merupakan salah satu topik yang sangat penting, bukan saja dilihat dari nilai-nilai ekonomi dan sosial, tetapi masalah ini mengandung konsukwensi politik yang sangat besar.

Peranan sektor pertanian menurut Nainggolan dalam Purwaningsih (2008) di Indonesia sangat penting dilihat dari keharusannya memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Diprediksi laju pertum-buhan pangan per tahun berada pada kisaran 1,25 persen.

Kebijakan pangan adalah untuk menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan dan organisasi pangan. Karena itu, kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduk akan menjadi tergantung pada negara lain. Artinya negara akan menjadi negara yang tidak berdaulat dalam hal pangan (Arifin, 2004)

Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara untuk tidak tergantung pad aimpor pangan dari negara lain. Ketergantungan suatu negara akan impor pangan apalagi hal itu berasal dari negara maju akan mengakibatkan pengambilan keputusan atas segal aspek kehidupan menjadi tidak lagi bebas dan merdeka dan karenanya mnjadi tidak berdaulat.

Secara konseptual, pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Kajian tentang sektor pertanian seolah tak terlepas tentang dengan diskusi tentang ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan sendiri berdasarkan Undnag-undang adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Ketahanan pangan terjadi ketika orang memiliki akses fisik dan ekonomi yang cukup, aman, dan makanan yang ber-

gizi untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka dan preferensi makanan untuk aktif dan hidup sehat. (Socha, 2012)

Apabila dicermati konsep ketahanan pangan tersebut, ketahanan pangan tidak hanya menyangkut aspek, jumlah, tetapi juga mutu, keamanan, dan gizi pangan (Sumastuti, 2010). Terdapat 8 (delapan) perihal mendasar yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan (*security food*) yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Rumah tangga sebagai unit perhatian terpenting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional maupun komunitas dan individu. (2) Kewajiban negara untuk menjamin hak atas pangan setiap warganya yang terhimpun dalam satuan masyarakat terkecil untuk mendapatkan pangan bagi keberlangsungan hidup. (3) Ketersediaan pangan mencakup aspek ketercukupan jumlah pangan (*food sufficiency*) dan terjamin mutunya (*food quality*). (4) Produksi pangan yang sangat menentukan jumlah pangan sebagai kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan. (5) Mutu pangan yang nilainya ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. (6) Keamanan pangan (*food safety*) adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keadaan manusia. (7) Kemerataan pangan merupakan dimensi penting keadilan pangan bagi masya-rakat yang ukurannya sangat ditentukan oleh derajad kemampuan negara dalam menjamin hak pangan warga negara negara melalui sistem distribusi produksi pangan yang dikembangkannya. Prinsip kemerataan pangan meng-amatkan sistem pangan nasional harus mampu menjamin hak pangan bagi setiap rumah tangga tanpa terkecuali. (8) Keterjangkauan pangan mempresentasikan kesamaan derajad keleluasaan akses dan kontrol yng dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam memenuhi hak pangan meraka. Prinsip ini merupakan salah satu dimensi keadilan pangan yang penting untuk diperhatikan. (Suresh, 2008)

Konsep ketahanan pangan yang diuraikan tersebut, dapat diringkas dalam 4 (empat) faktor utama, yaitu: (1) Ketersediaan pangan merupakan ketercukupan jumlah pangan (*food sufficiency*). (2) Keamanan pangan (*food safety*) adalah pangan yang bebas dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keadaan manusia serta menjami mutunya (*food quality*) yaitu dengan memenuhi kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. (3) Kemerataan pangan merupakan sistem distribusi pangan yang men-dukung tersedianya pangan setiap saat dan merata. (4) Keterjangkauan pangan adalah kemudahan rumah tangga untuk mem-peroleh pangan dengan harga yang terjangkau. (Ejeta, 2009)

Dalam kaitan tersebut, ketahanan pangan di Indonesia lebih diarahkan pada kebutuhan dasar yang terjangkau oleh masyarakat, dalam hal ini diantaranya adalah beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Amang dan Sawit (2001) menyatakan bahwa beras merupakan komoditi yang unik. Beras mempunyai peran strategis dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ke-amanan serta stabilitas politik nasional.

Oleh sebab itu pasokan dan harga yang stabil, tersedia sepanjang waktu, terdistribusi secara merata dan dengan harga terjangkau merupakan kondisi ideal yang diharapkan dari perberasan nasional. Jawa Timur merupakan salah satu lumbung beras dan berperan sebagai penyangga pangan nasional.

Namun demikian, di daerah yang mengalami surplus beras sekitar 4 juta ton pada tahun 2012 masih terdapat realitas social kerawanan pangan yang mencemaskan. Data BPS (2012) menunjukkan persentase penduduk miskin di Jawa Timur masing-masing sebesar 16,68 persen, 15,26 persen dan 13,85 persen selama periode 2009 – 2011. Kendati terus mengalami penurunan, persentase penduduk miskin masih berada

pada level diatas 10 persen yang berarti masih sekitar 7,1 juta orang atau 1,8 juta keluarga.

Dengan demikian, surplus beras tidak mencerminkan ketangguhan ketahanan pangan Jawa Timur jika kesenjangan antar rumah tangga dalam meng-akses pangan tidak tertangani. Penjualan beras ke konsumen dalam propinsi Jawa Timur bisa melibat-kan delapan pelaku mulai dari petani, pedagang lokal, pengusaha RMU, kontraktor (pedagang besar), DOLOG, grosir, pedagang pengecer dalam propinsi dan terakhir konsumen (Sudana. Et al. 2002). Jaringan organisasi yang menyangkut hubungan ke hulu *(upstream)* dan ke hilir *(downstream)* dalam proses dan kegiatan yang berbeda yang menghasilkan nilai yang terwujud dalam barang dan jasa di tangan pelanggan akhir dapat didefinisikan sebagai *supply chain*.

Berangkat dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa struktur *supply chain* beras di Jawa Timur sangat panjang terutama pada sistem distribusinya, sehingga mendorong harga beras menjadi tinggi karena masing-masing pelaku akan mengambil keuntungan dan tingginya biaya transportasi untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu banyaknya pelaku pendistribusian beras cenderung memperlebar disparitas harga gabah dan beras (Jamal. Et al. 2006).

Kajian sejenis pernah dilakukan Sudana. et al. (2002) yaitu mengetahui system dan pola distribusi gabah/beras dari produsen ke tingkat konsumen di Jawa Timur efektivitas harga dasar di tingkat mikro, dan faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga beras. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dilakukan pada periode yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kegiatan survey, data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan kelompok tani, pengusaha penggilingan, pelaku pemasaran beras dan gabah serta instansi terkait tingkat propinsi dan kabupaten. Data sekunder bersumber dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dan Bulog Divre Jawa Timur.

Mengingat populasi yang sangat besar dan menyebar di seluruh Jawa Timur maka penentuan sampel yang diwawancarai dilakukan dengan meng-gunakan teknik *two stage sampling*. **Pada tahap 1,** dipilih Kabupaten-Kabupaten di Jawa Timur yang menjadi sampel penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan kabupaten tersebut merupakan sentra produksi padi yang besar di Jawa Timur.

Selanjutnya jumlah sampel minimum ditetapkan sebesar 20% dari Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur yaitu Bojonegoro, Jember, Lamongan, Ngawi, Malang, Pasuruan, dan Banyu-wangi. **Pada tahap 2**, pengambilan sampel yaitu pelaku-pelaku perbesaran yang terletak pada Kabupaten dan Kota yang telah dipilih pada tahap 1 dilakukan dengan teknik *snow ball sampling* dengan *"starting print"* dari petani atau kelompok tani. *Snow ball sampling* merupakan teknik *sampling* dimana inisial responden dipilih secara acak, setelah di interview responden diminta untuk mengidentifikasi siapa yang dapat dipilih kemudian. Teknik ini dipakai karena peneliti tidak banyak mengetahui mengenai pelaku-pelaku perbesaran yang ada di Jawa Timur dan hanya bisa mengidentifikasi satu atau dua orang kelompok tani yang bisa dijadikan sampel.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pemasaran beras dan gabah serta distribusinya di setiap Kabupaten/Kota Jawa Timur diwawancarai dua pelaku mulai dari petani sampai pedagang beras. Pengumpulan data dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan di tingkat petani, pengusaha penggilingan dan pelaku pemasaran beras dan gabah. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2013. Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif, dimana data kuantitatif dianalisis dengan analisis tabulasi silang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perberasan di Jawa Timur

Perkembangan produksi padi sawah dan lading di Jawa Timur selama enam tahun (2007-2012) menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2011. Tabel 1 memperlihatkan total luas panen, produktivitas serta total produksi padi pada tahun 2007-2012**.**

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh rata-rata prosentase pertumbuhan luas panen meningkat 2,66 persen per tahun, produktivitas meningkat sebesar 2,86% serta total produksi juga mengalami peningkatan sebesar 5,69 persen per tahunnya. Jika dilihat dari produksi padi pada 7 kabupaten yang menjadi sampel penelitian, dapat dilihat bahwa produksi padi pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup signifikan disbanding tahun 2007 kecuali pada Kabupaten Pasuruan (Tabel 2 dan 3). Dari hasil perhitungan, ketujuh kabupaten tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar dalam produksi padi di Jawa Timur yaitu sekitar 40 persen.

Dilihat dari periode panen pada Tabel 2, produksi padi tertinggi di Jawa Timur terjadi pada periode panen Januari-April, yaitu sekitar 46-50 persen dari total produksi padi di panen pada periode ini. Produksi ini merupakan hasil pertanaman padi musim hujan (MH). Periode panen kedua terbesar adalah pada bulan Mei-Agustus yaitu sekitar 36-40 persen dari total produksi gabah. Produksi ini merupakan hasil pertanaman padi MK I (Musim Kemarau 1), sedangkan sisanya 14 persen lagi dipanen pada periode September-Desember.

Dengan melihat perilaku panen padi di atas, dimana panen raya terjadi pada bulan Januari-April. Untuk mengamankan hasil padi petani agar harga gabah yang diterima petani tidak jatuh, minimal sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah, maka seyogyanya operasi pasar oleh pihak Bulog dan instansi terkait dilakukan pada periode di atas.

Produksi padi Jawa Timur menempati urutan kedua setelah Jawa Barat. Dengan membandingkan produksi padi di Jawa Timur dan Indonesia selama tahun 2010-2012

Tabel 1. Luas panen, produktivitas dan produksi padi di Jawa Timur

Tahun	Luas panen (Ha)	Produktivitas (Kw/ha)	Produksi (ton)
2007	1,736,048	54.16	9,402,029
2008	1,772,505	59.02	10,464,564
2009	1,874,830	59.11	11,052,998
2010	1,963,983	59.29	11,643,773
2011	1,924,405	55.49	10,565,594
2012	1,975,719	61.74	12,198,707

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jatim 2012

Tabel 2. Luas panen, produktivitas dan produksi padi per sub round di Jawa Timur tahun 2007.

Kab/Kota	Januari-April			Mei-Agustus			September-Desember			Jan-Des
	L. P Ha	Pvts Kw/ Ha	Prdks Ton	L. P Ha	Pvts Kw/ Ha	Prdks Ton	L. P Ha	Pvts Kw/ Ha	Prdks Ton	Prdks Ton
Malang	20,120	53.9	108,488	23,900	55.1	131,617	16,451	54.90	90,317	330,422
Jember	67,891	53.5	363,585	54,566	51.8	282,970	16,394	53.25	87,298	733,853
Banyuwangi	31,184	57.5	179,438	46,836	55.1	257,970	35,555	56.49	200,836	638,244
Pasuruan	40,479	57.9	234,587	24,557	60.4	148,514	16,051	54.81	87,976	471,077
Ngawi	41,784	53.7	224,644	43,755	55.2	241,686	17,629	54.12	95,408	561,738
Bojonegoro	43,869	56.5	248,267	52,100	53.7	279,834	10,895	53.43	58,212	586,313
Lamongan	57,481	60.8	349,968	52,002	57.2	297,506	16,953	54.74	92,798	740,272
Jumlah 7 kab	302,808	56	1,708,977	42,531	56	1,640,097	129,928	55	712,845	4,061,919
Jawa Timur	803,808	54.4	4,376,239	686,632	53.7	3,687,183	245,456	54.54	1,338,607	9,402,029

Sumber: Dinas Pertanian – Provinsi Jawa Timur 2007

Tabel 3. Luas panen, produktivitas dan produksi padi per sub round di Jawa Timur tahun 2012

Kab/Kota	Januari-April			Mei-Agustus			September-Desember			Jan-Des
	L. P Ha	Pvts Kw/ Ha	Prdks Ton	L. P Ha	Pvts Kw/ Ha	Prdks Ton	L. P Ha	Pvts Kw/ Ha	Prdks Ton	Prdks Ton
Malang	23,575	70	165,201	19,200	61	116,757	17,126	79	134,646	416,605
Jember	76,160	64	484,336	61,873	59	367,627	20,535	57	116,541	968,504
Banyuwangi	49,435	62	305,664	37,962	60	229,235	30,789	64	197,362	732,261
Pasuruan	40,330	59	235,932	26,044	66	172,018	22,569	72	163,558	571,509
Ngawi	46,093	61	283,126	45,377	58	263,862	24,791	65	161,705	708,694
Bojonegoro	75,828	64	481,797	48,912	53	260,890	9,094	72	65,422	808,109
Lamongan	69,223	63	436,989	61,229	57	346,109	12,697	58	73,787	856,885
Jumlah 7 kab	380,644	63	2,393,045	42,942	59	1,756,499	137,601	67	913,022	5,062,566
Jawa Timur	1,016,682	62	6,307,444	692,942	60	4,124,461	266,095	66	1,766,802	12,198,707

Sumber; Dinas Pertanian – Provinsi Jawa Timur

Tabel 4. Produksi Padi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2010-2012 (tonGKG)

Tahun	2010	2011	2012
Produksi Jatim	11.643.773	10.565.594	12.198.707
Produksi Indonesia	66.496.394	65.756.904	69.022.515
Kontribusi Jatim terhadap Indonesia	17,51%	16,07%	17,67%

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 2013

diperoleh kontribusi Jawa Timur terhadap produksi padi nasional sekitar 17 persen. Dengan produksi padi sebesar 12.198.07 ton GKG (Gabah Kering Giling) maka akan setara dengan 7.929.160 ton beras. Jika diasumsikan konsumsi bera untuk penduduk Jawa Timur sebesar 3.458.633 ton maka terjadi surplus sebesar 4.470.527 ton pada tahun 2012. Tidak berlebihan jika dikatakan Jawa Timur merupakan salah satu lumbung beras di Indonesia.

Total pengadaan beras oleh Bulog Jatim pada tahun 2007 sebesar 823.633 ton dan meningkat menjadi 1.411.480,34 ton pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan produksi beras di Jawa Timur maka prosentase pengadaan oleh Bulog mencapai 17,8 persen pada tahun 2012. Pengadaan beras pada bulan Januari-Mei merupakan pengadaan terbesar yang dilakukan oleh Bulog yaitu sekitar 45-55 persen dikarenakan periode tersebut merupakan panen raya.

Pengeluaran beras oleh Bulog diperuntukkan untuk raskin, cadangan pemerintah per provinsi dan kabupaten (alokasi untuk bantuan bencana alam), operasi pasar, dan *'move out'* (beras yang diperdagangkan keluar provinsi). Total pengeluaran beras yang dilakukan oleh Bulog Drive Jawa Timur pada tahun 2007 sebesar 616.424 ton dan meningkat menjadi 1.127.646, 29 ton pada tahun 2012.

Berdasarkan data *movement* nasional dari Perum Bulog Drive Jawa Timur selama tahun 2007-2012 berturut-turut sebesar 194.750, 545.727, 496.465, 179.152, 267.450 dan 444.988 ton beras. Dari data tersebut dapat dilihat *movement* nasional terbesar terjadi pada tahun 2009 dan 2012. Adapun distribusi beras mencapai lebih dari 15 provinsi di Indonesia, diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya.

Sistem Rantai Pasokan Perberasan di Jawa Timur

Sentra produksi padi di Jawa Timur, sistem rantai pasokan perberasan Jawa Timur teridentifikasi memiliki pelaku-pelaku usaha, yang terdiri atas: petani, pedagang gabah lokal, pedagang gabah luar kabupaten/ provinsi, KUD, pengusaha penggilingan, pedagang beras grosir, pedagang beras eceran, pedagang beras antar provinsi, mitra kerja Bulog, Satgas Pengadaan Dalam Negeri Bulog, UB-PGB milik Bulog dan konsumen. Gambar 1 menunjukkan jaringan rantai pasokan industri perberasan Jawa Timur yang menunjukkan keterkaitan antar pelaku usaha dan aliran material (gabah dan beras) yang berlangsung.

Pedagang gabah lokal (pedagang ga-

bah di tingkat desa/kecamatan/ kabupaten) berperan membeli gabah petani berupa Gabah Kering Panen (GKP) kemudian hasil pembeliannya dijual ke unit penggilingan padi. Selanjutnya gabah yang ditampung tersebut dikeringkan menjadi Gabah Kering Giling (GKG) dan digiling/diselep menjadi beras oleh pengusaha penggilingan. Di setiap kabupaten yang menjadi sampel penelitian, pengusaha penggilingan yang memiliki RMU dan lantai jemur juga berperan sebagai pedagang beras dan aktif melakukan kegiatan pemasaran beras. Beras yang telah dikemas dalam ukuran 5 kg, 10 k, dan atau 25 kg dengan merek mereka, selanjutnya dijual ke pasar bebas melalui pedagang beras antar provinsi (eksportir), pedagang beras grosir dan pedagang beras pengecer.

Penggilingan skala besar (sebagai contoh penggilingan beras merek "Mentari" di Kediri) menjual beras langsung ke pedagang grosir, kemudian pedagang grosir menjualnya ke pedagang pengecer dan selanjutnya konsumen membeli dari pedagang pengecer. Sedangkan penggilingan skala kecil, cenderung langsung menjual beras ke pedagang pengecer (diantaranya pedagang di pasar-pasar). Ketatnya persaingan antar penggilingan-penggilingan dan terbatasnya pasokan gabah dari pedagang gabah lokal pada wilayah tertentu, maka pihak penggilingan juga bisa membeli gabah secara langsung dari petani atau membeli dari pedagang gabah luar kabupaten/provinsi untuk bisa memenuhi permintaan pasar dengan harga yang bersaing.

Pembelian gabah dari Petani yang dilakukan oleh Bulog Drive Jawa Timur dilakukan melalui tiga saluran: 1) mitra kerja Bulog, dapat berupa penggilingan padi (UD, CV, dll), Gapoktan, KTNA, KUD, dan sejenisnya, 2) Satgas Bulog, 3) UB-PGB (unit bisnis pengelolaan gabah beras) milik Bulog. Setelah dilakukan pembelian gabah dari petani, mitra kerja Bulog dan UB-PGB akan menggiling gabah tersebut dan mengirim beras ke Gudang Bulog Drive maupun Sub Drive yang ada di Jawa Timur. Sedangkan Satgas Bulog akan membeli dalam bentuk gabah dan langsung dikirimkan ke gudang Bulog. Selain itu, Koperasi Unit Desa (KUD) juga berperan dalam sistem rantai pasokan perberasan dengan membeli gabah dari petani dan selanjutnya menjual beras ke pedagang grosir, pedagang pengecer atau langsung ke konsumen.

Margin Pemasaran Beras di Jawa Timur

Tingkat harga gabah yang diterima petani rata-rata berkisar Rp 3.345/kg GKP pada tahun 2012. Harga ini lebih tinggi dengan harga dasar gabah yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 3.300/kg GKP (dengan maksimum 25 persen kualitas kadar air dan 10 persen kadar kotoran). Hal ini menunjukkan bahwa pada musim panen tahun 2012, stabilitas harga gabah di tingkat petani di Jawa Timur dapat dijaga. Margin pemasaran beras ditingkat Kabupaten yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. Dari tabel 5, 89 persen dari harga eceran beras merupakan harga yang diterima petani padi, 9 persen harga yang diterima usaha penggilingan dan sisanya 2 persen diterima baik oleh pedagang beras grosir dan atau pengecer.

Biaya variabel yang harus ditanggung oleh pengusaha penggilingan adalah biaya penggilingan, biaya penanganan termasuk biaya karung, biaya simpan, bongkar muat dan lain-lain, serta biaya transportasi dari petani sampai ke pedagang beras grosir/ pengecer. Dari total margin sebesar 9% terdistribusi 3% untuk biaya penggilingan dan masing-masing 2% untuk biaya penanganan, biaya transportasi dan laba pengusaha penggilingan. Sedangkan di level pedagang, laba perdagangan termasuk biaya modal, resiko dan lain-lain sebesar 1,7 persen dari harga eceran beras.

Dari analisis margin pemasaran beras seperti ditampilkan Tabel 5 menunjukkan bahwa margin pemasaran beras yang diterima pedagang relatif kecil dari harga eceran beras ditingkat konsumen. Berdasarkan kenyataan di atas menunjukkan bahwa pemasaran beras di Jawa Timur relatif efisien dan pem-bagian margin antara petani dan pedagang juga cukup adil.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Turunnya Harga Gabah

Pada musim panen tahun 2012 tidak dijumpai turunnya harga gabah di ketujuh kabupaten contoh, dimana harga gabah yang terjadi masih berkisar pada harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Namun menurut pengalaman petani pergerakan turunnya harga gabah kadang-kadang terjadi tiba-tiba. Pergerakan turunnya harga gabah umumnya lebihh cepat dibandingkan dengan turunnya harga beras, menurut pengalaman petani harga beras relatif lebih stabil dibandingkan dengan harga gabah.

Dari hasil wawancara dengan kelompok tani di tujuh kabupaten dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi turun naiknya harga gabah ditingkat petani yaitu: 1) Kualitas gabah. Kualitas gabah yang dihasilkan petani sangat mempengaruhi tingkat harga yang diterima. Kualitas gabah dapat disebabkan oleh factor biofisik tanah, sebagai contoh kualitas gabah di Kabupaten Malang lebih baik dibandingkan produksi gabah di Kabupaten Lamongan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah butir hampa, dan rendemen. Disamping itu curah hujan waktu panen sangat mempengaruhi kualitas gabah, curah hujan yang cukup tinggi pada saat panen mengakibatkan kadar air gabah menjadi tinggi, proses pengeringan menjadi masalah sehingga akan menurunkan harga gabah. Kualitas gabah juga dipengaruhi oleh cara dan alat panen yang digunakan, perontokan tanpa *power-thresher* mengakibatkan kadar kotoran dan kehilangan gabah menjadi tinggi, lebih-lebih pada saat panen terjadi hujan; 2) Pola tanam. Pola tanam yang tidak serempak antar lokasi atau kabupaten mengakibatkan masa panen juga tidak serempak, hal ini akan menghindari terjadinya over suplai, dengan demikian tingkat harga gabah dapat dipertahankan. Pola tanam tidak serempak berdampak positif terhadap harga produksi gabah, tapi perlu diantisipasi serangan hama dan penyakit; 3) Operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog, menurut petani kadang-kadang terlambat dilakukan. Seyogyanya operasi pasar dilakukan sebelum harga jatuh, operasi pasar segera dilakukan apabila terjadi panen serempak pada hamparan yang cukup luas, serta bila pada saat panen terjadi hujan yang berkepanjangan.

SIMPULAN

Distribusi gabah/beras dari tingkat produsen sampai ke konsumen melibatkan pelaku-pelaku yaitu petani, pedagang gabah lokal, pedagan gabah luar kabupaten/ provinsi, KUD, pengusaha penggilingan, pedagang beras grosir, pedagang beras eceran, pedagang beras antar provinsi, mitra kerja Bulog, Satgas Pengadaan Dalam Negeri Bulog, UB-PGB milik Bulog dan konsumen. Berdasarkan analisis margin pemasaran diperoleh kesimpulan tidak terjadi distorsi pasar yang mengakibatkan harga gabah dan beras pada tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

Amang, Beddu. & Sawit Husein. (2001). *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional,Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi.* Edisi Kedua, Bogor: IPB Press.

Arifin, Bustanul. (2004). *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia.* Jakarta: Penerbit Kompas.

Badan Pusat Statistik. (2012). *Data Penduduk Miskin Jawa Timur*. Provinsi Jawa Timur Dalam Angka : BPS.

Boeke. (1983). *Prakapitalisme di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan.

Ejeta, Gebisa. (2009). *Revitalizing Agricultural Research for Global Food Security. Springer*. Vol. 1 (4).

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. (n.d.). website http://www.pertanian.go.id/diralamatskpd/tampil.php?page=jatim

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. (n.d.). website http://www.bulogjatim.com

Indrajit, Richardus Eko., & Djokopranoto R. (2002), *Konsep Manajemen Supply Chain.* Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana.

Jamal, Erizal. et al .(2006). *Analisis Kebijakan Penentuan Harga Pembelian Gabah.* Laporan Akhir Penelitian. (tidak dipublikasikan). Pusat analisis social ekonomi dan kebijakan pertanian – Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Purwaningsih, Yunastiti. (2008). Ketahanan pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 9 Nomor 1 Juni. Halaman 1 – 27.

Socha, Teresa. (2012). Food Security in a North-

ern First Nations Community : An Exploratory Study on Food Availability and Accessibility. *Journal of Aboriginal Health.* Vol 2 (5).

Sudana. Et al . (2002). Perilaku Perberasan di Jawa Timur, *Jurnal Socio Economic of Agriculture & Agribusiness,* Vol. 2 (2).

Suresh. (2008). A Framework For Evaluating Food Security and Nutrition Monitoring Systems. *African Journal of Food Agriculture and Nutritional Development (AJFAND).* Vol 5 No 2.

Sumastuti, Efriyani. (2010). Jiwa Entrepreneurship untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan. *Jejak Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*. Vol 3 Nomor 1, Maret.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Tentang Pangan.

Yustika, Ahmad Erani. (2007). Perdesaan, Pertanian, dan Modal : Tinjauan Ekonomi Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.* Vol No 2, Desember.